



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2007 - 2008**

SENIN, 7 JANUARI 2008

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

**Yang kami hormati para Wakil Ketua,
Yang kami hormati para anggota Dewan,**

Sidang Dewan yang terhormat,

Hari ini, Dewan membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2007 -2008 yang akan berlangsung sampai tanggal 4 April 2008 yang akan datang. Dari catatan Sekretariat Jenderal, sejumlah ... Anggota Dewan telah menandatangani daftar hadir dari semua fraksi yang ada di lembaga ini. Oleh karena itu, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2007-2008, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berkaitan dengan Hari Besar Keagamaan dan Tahun Baru 2008, izinkanlah terlebih dahulu Pimpinan Dewan menyampaikan "Selamat Idul Idha 10 Dzulhijjah 1428 H, kepada para anggota Dewan dan umat Islam yang merayakannya. Semoga dengan Hari Raya Qurban ini, senantiasa mengingatkan perlunya kita terus menerus memupuk rasa kesadaran dan semangat berkorban bagi sesama. Juga kami ucapkan "Selamat Natal 2007" bagi anggota Dewan dan Umat Kristiani yang merayakannya. Kiranya Kasih Tuhan akan senantiasa menyertai pengabdian saudara-saudara sekalian dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, berkenaan dengan datangnya Tahun 2008, melalui mimbar yang terhormat ini, kami ingin menyampaikan ucapan "Selamat Tahun Baru 2008". Kita berharap, bangsa Indonesia dapat melalui tahun 2008 dengan selamat, dijauhi dari segala macam bencana, memperoleh Ridho dan Rahmat Allah SWT dalam langkah-langkah kita membangun kehidupan kenegaraan yang berkeadilan dan

berkesejahteraan, mampu menatap masa depan yang penuh dengan tantangan. Amin.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum kami melanjutkan pidato pembukaan ini, perlu kami sampaikan kepada Sidang Dewan yang terhormat, bahwa Dewan telah menerima surat dari DPD RI, yaitu nomor HM.310/491/DPD/XII/2007 perihal Penyampaian Keputusan DPD RI, di antaranya memuat Pertimbangan DPD RI atas RUU tentang Pornografi; Pertimbangan DPD terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun Anggaran 2006; dan Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Selanjutnya, Dewan juga telah menerima surat dari Presiden RI dengan nomor R-70-Pres/12/2007 perihal Permohonan Pertimbangan bagi Duta Besar LBBP Republik Cyprus untuk Republik Indonesia. Terhadap surat-surat dimaksud, Dewan akan menindaklanjutinya melalui Badan Musyawarah dan komisi-komisi terkait, sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Tata Tertib Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kita baru saja memasuki tahun 2008, tahun yang kita prediksi masih sarat dengan berbagai persoalan besar yang melanda negeri ini. Tahun yang penuh dengan tantangan, namun sekaligus memiliki harapan apabila seluruh komponen bangsa bersatu padu, memiliki tekad dan semangat yang sama untuk bersama-sama mengatasi problema - problema yang dihadapi oleh bangsa kita.

Era reformasi yang sedang kita jalani, berkembang sangat dinamis. Perubahan-perubahan besar dalam kehidupan bernegara, keterbukaan yang seluas-luasnya, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kritikan-kritikan tajam yang disampaikan oleh elemen-elemen masyarakat yang ditujukan kepada Presiden, pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya melalui media, diskusi-diskusi kenegaraan, seminar, dan lain-lain, kita jumpai sehari-hari.

Sepanjang tahun 2007, kebebasan dan keterbukaan kadang kala mengundang tindakan anarkis, pada umumnya sebagai akibat lebih lanjut dari pembebasan tanah untuk kepentingan publik, kebijakan efisiensi di perusahaan-perusahaan dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan eksekusi proses pilkada di daerah-daerah. Untuk tahun 2008, kita khawatir situasi ini akan terus berlanjut apabila kita tidak segera mengatasinya.

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan dilakukannya Pilkada Ulang untuk pemilihan gubernur Sulawesi Selatan, untuk Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, dan Tana Toraja, dikuatirkan akan memicu konflik horizontal masyarakat setempat. Kalau ini terjadi, berarti proses demokrasi mengalami kemunduran jauh ke belakang. Reaksi masyarakat atas Keputusan MA begitu besar. Masyarakat menilai Keputusan MA tersebut melampaui kewenangan yang dimilikinya, MA keliru memaknai UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. KPUD menolak melaksanakan Pilkada ulang. Namun, kita perlu menyadari bahwa negara kita adalah negara hukum. Oleh karena itu, jalan yang paling baik dalam penyelesaian masalah ini adalah dengan menempuh upaya hukum yang masih

tersedia di MA yaitu Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan Kembali atas Putusan MA merupakan langkah yang paling baik, agar masalah ini tidak menimbulkan konflik yang merusak persatuan dan kesatuan, yang pada akhirnya mengganggu roda perekonomian masyarakat setempat.

Pada tahun 2008, tercatat sekitar 138 daerah provinsi, kabupaten/ kota yang akan melakukan Pilkada. Apa yang terjadi di Sulawesi Selatan yang akan diikuti oleh Pilkada Maluku Utara, yang sekarang sedang dalam proses di MA, hendaknya menjadi perhatian kita bersama.

Demokratisasi sebagai amanat reformasi akhir-akhir ini mendapat sorotan, terutama dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Berbagai kalangan menggugat upaya demokratisasi yang justru dianggap menciptakan kemiskinan. Dewan berpendapat bahwa demokrasi sesungguhnya merupakan langkah panjang yang perlu ditempuh dan dihayati oleh segenap bangsa Indonesia. Dengan demokratisasi, sesungguhnya kesejahteraan rakyat terbuka lebar untuk terwujud dan kesejahteraan yang terwujud dengan jalan ini memiliki daya tahan dan *sustainability* yang lebih permanen daripada kesejahteraan tanpa demokrasi, karena melalui demokratisasi dapat tercipta transparansi, kepastian hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kalangan Dewan berpendapat bahwa demokratisasi perlu lebih diarahkan pada substansi penciptaan keadilan sosial ekonomi dengan menekankan pada program nyata bagi penciptaan *clean government* dan *good governance*. Oleh karena itu, dalam konteks program penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan, Pemerintah perlu betul-betul memfokuskan pada program tersebut dengan perspektif pada kepentingan rakyat banyak.

Sidang Dewan yang terhormat,

Hiruk-pikuk politik di tahun 2008 khususnya menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 adalah proses demokrasi yang harus dipandang sebagai salah satu langkah menuju kematangan dan kemajuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses ini harus tetap berjalan, tetapi jangan sampai merusak sendi-sendi pembangunan bangsa. Marilah dalam sisa waktu kurang dari 2 tahun ini, semua langkah hendaknya tidak hanya terfokus kepada pembangunan politik, tetapi harus lebih diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memang sepanjang tahun 2007 masih jauh dari harapan. Tingkat kemiskinan masih tinggi, angka pengangguran mencapai \pm 10,55 juta jiwa karena bertambahnya angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja, masalah Tenaga Kerja Indonesia di negara-negara penerima, khususnya di Kawasan Timur Tengah dan Malaysia, yang senantiasa menuai persoalan besar yang memerlukan perlindungan maksimal serta bantuan advokasi yang bersifat preventif agar pelecehan, penyiksaan dan pengusiran semena-mena, tidak terjadi lagi. Dunia transportasi juga belum menggembirakan setelah adanya larangan terbang terhadap 51 maskapai penerbangan internasional ke negara-negara Uni Eropa, masalah pendidikan, penciptaan Sumber Daya Manusia yang masih sangat jauh dari harapan. Itu semua merupakan pekerjaan rumah yang harus ditangani dengan baik. Juga masalah penanganan atas berbagai bencana yang terus melanda

berbagai wilayah Indonesia, terakhir bencana tanah longsor dan banjir di banyak wilayah, khususnya di Sumatera Utara, Jateng, Jatim, dan NTB yang menimbulkan berpuluh-puluh orang tewas, hilang, memporakporandakan sarana, prasarana, fasilitas umum, dan rumah-rumah penduduk. Khusus mengenai penanganan bencana seperti banjir, gempa, dan tanah longsor, Dewan juga berharap agar Pemerintah secara komprehensif membuat program pasca-bencana yang tepat, seperti pemberian santunan, evakuasi korban, serta program penanganan dampak psikologis korban yang bisa saja menjadi masalah sosial ekonomi. Oleh karena itu, konsentrasi tidak hanya berkaitan dengan persiapan agenda tahun 2009. Proses politik harus berbarengan dengan langkah-langkah lain dalam mengatasi problema-problema besar serta pembangunan ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lalu bagaimana dengan kinerja DPR sendiri? Sepanjang tahun 2007 lembaga kita ini tidak lepas dari sorotan tajam masyarakat, baik yang disampaikan melalui LSM yang sekarang ini tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, maupun kritikan para pakar, pengamat dan elemen masyarakat lainnya. Pelaksanaan atas tiga fungsi utama Dewan, tidak lepas dan perhatian masyarakat, bahkan selalu mengundang opini. Tidak kurang dan pernyataan Wakil Presiden berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran DPR yang dianggap dapat menimbulkan inefisiensi karena terlalu detail dalam pembahasan, berlarut-larut dan lamban. *Checks and balances* sangat diperlukan, tetapi jangan sampai menimbulkan hubungan yang rumit antara kedua lembaga.

Di bidang pengawasan, juga menimbulkan kritik karena DPR kadang mencampuri wilayah domain pemerintah. Pelaksanaan hak-hak DPR juga belum maksimal dilaksanakan seperti hak interpelasi dan hak angket.

Untuk fungsi legislasi, kita akui benar-benar belum optimal dilaksanakan karena adanya berbagai kendala. Walaupun kendala-kendala tersebut berusaha diminimalisir, namun DPR periode 2004-2009 baru dapat menyelesaikan 93 dari 284 RUU yang ditetapkan Prolegnas, itu pun termasuk RUU-RUU pemekaran. Sementara itu, banyak RUU yang sangat mendesak untuk diselesaikan, baik di bidang politik, ekonomi, industri dan perdagangan, maupun bidang kesejahteraan rakyat. Tim Peningkatan Kinerja DPR RI berusaha untuk meminimalkan berbagai kendala, antara lain mengatur pembagian waktu yang tumpang tindih dalam agenda rapat-rapat DPR, berusaha mengurangi perangkapan keanggotaan dalam berbagai pansus terutama untuk fraksi-fraksi kecil, fasilitas pendukung dan dukungan tenaga ahli selain untuk fraksi-fraksi, alat-alat kelengkapan dewan, juga direncanakan untuk seluruh anggota Dewan. Walaupun Badan Musyawarah (Bamus) telah menetapkan alokasi waktu yang tersedia, 60% untuk pelaksanaan fungsi legislasi, 40% untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran, itu pun nampaknya belum menjamin efektifitas produk DPR di bidang perundang-undangan. Oleh karena itu, tahun 2008 fungsi ini harus benar-benar dipacu, karena dari catatan Badan Legislasi (Baleg), ada 32 RUU yang harus diselesaikan, ditambah 48 RUU *carry-over* dari tahun 2007. Total ada 80 RUU, termasuk RUU pemekaran yang memenuhi syarat perundang-undangan, yang akan diproses lebih lanjut. Perlu klasifikasi, RUU-RUU mana saja yang dikategorikan sangat

prioritas dalam penyelesaian.

Sementara itu, pelaksanaan fungsi dan tugas alat-alat kelengkapan lain tidak luput dan perhatian masyarakat. Kinerja Badan Kehormatan dalam menegakkan etika sesuai Kode Etik yang telah dimiliki DPR RI hasilnya dipantau masyarakat. Untuk tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka Tata Cara Beracara oleh Badan Kehormatan (BK) sedang dibahas bersama Baleg. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dalam menangani masalah-masalah internal kerumah-tangga juga menuai pendapat masyarakat, bahkan pendapat yang sangat negatif. Masalah studi banding anggota/Komisi Dewan ke luar negeri cukup tajam disoroti, kadang-kadang beritanya sudah tidak proporsional lagi. Ini semua hendaknya menjadi masukan berharga bagi langkah kita ke depan. Kita perlu mencermati berbagai kritik tersebut, kita perlu meminimalisirnya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masa Sidang III ini dialokasikan selama 58 hari kerja atau 89 hari kalender. Masa Sidang ini direncanakan cukup panjang sesuai kehendak fraksi-fraksi dalam rapat Bamus, untuk memacu fungsi legislasi. RUU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus diselesaikan paling lambat bulan Februari 2008, agar KPU dapat segera memiliki landasan hukum untuk persiapan Pemilu 2009. RUU Pemilu tersebut saat ini pembahasannya sudah memasuki tahap perumusan oleh Tim Perumus yang akan bekerja mulai minggu pertama masa sidang ini dan *Insyah Allah* akan selesai pada akhir bulan Januari 2008. Beberapa substansi krusial memang masih menjadi perdebatan di dalam Pansus seperti halnya tentang sistem pemilu yang terkait dengan penetapan calon terpilih, format surat suara, penghitungan sisa suara, dan tentunya daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk tiap daerah pemilihan. Namun demikian, dalam semangat memperbaiki kekurangan Pemilu 2004 lalu serta mengarah kepada pelaksanaan pemilu yang lebih efektif dan efisien, fraksi-fraksi serta pemerintah memiliki semangat yang sama untuk segera menyelesaikannya. Agenda semula RUU ini selesai pada Masa Sidang II Desember lalu. Selain itu, Pansus diharapkan dapat memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini, yang memberi lampu hijau kepada para mantan narapidana politik dan terpidana ringan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, apakah ini analog dengan pencalonan bagi anggota legislatif. Pada prinsipnya, setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, kecuali yang dibatasi oleh UU. Hal ini memang belum diputuskan, namun demikian semangat yang hendak dibangun adalah bahwa setiap warga negara memiliki potensi untuk menjadi wakil rakyat dan diberikan kesempatan berkompetisi dalam pemilu. Sama halnya dengan perempuan melalui *affirmative action*, daftar calon dari partai politik harus memuat keterwakilan perempuan 30%. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya kesetaraan gender dalam lembaga perwakilan.

Selain itu, Dewan segera membahas RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; RUU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD; RUU Perubahan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga memerlukan prioritas utama,

untuk menampung keikutsertaan calon perseorangan dalam pilkada. Sedangkan RUU bidang politik yang lain di antaranya RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik; RUU Ombudsman RI; RUU Keimigrasian; RUU Penyelesaian Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Di bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan terdapat 2 (dua) RUU bidang perpajakan yaitu RUU tentang Perubahan UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan RUU tentang Perubahan UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; RUU Ketenagalistrikan; dan RUU tentang Perbankan Syariah. Di bidang kesejahteraan sosial, antara lain RUU tentang Perubahan atas UU No.17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; RUU tentang Kesehatan; RUU tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan RUU tentang Narkotika.

RUU tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, antara lain mengatur pembatasan dalam melaksanakan ibadah haji, prioritas kepada mereka yang untuk pertama kali menunaikan ibadah haji. Dengan RUU ini diharapkan adanya peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pelayanan yang memuaskan kepada jamaah harus menjadi moto yang dipegang teguh dan menjadi pedoman utama bagi berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.

RUU Narkotika sedang dalam proses pembahasan antara Dewan dan Pemerintah. Narkotika dengan segala jenisnya telah merasuk seluruh generasi, terutama generasi muda. Indonesia sekarang ini bukan hanya daerah transit dan konsumen narkotika, tetapi sudah menjadi wilayah dan tempat produksi. Oleh karena itu, RUU ini tidak dapat ditunda-tunda.

Sidang Dewan yang terhormat,

Saat ini Dewan juga sedang memprioritaskan RUU Batas Wilayah NKRI. Pembahasan RUU ini merupakan amanah dari konstitusi negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 25 A, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*" Hal ini menunjukkan bahwa mutlak diperlukan suatu undang-undang yang mengatur perbatasan sebagai dasar kebijakan dan strategi untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, memperkuat potensi, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya alam, menegakkan Wawasan Nusantara, dan kesadaran sebagai negara maritim kepulauan.

Selain amanat UUD 1945 beserta perubahan-perubahannya, juga dipicu oleh munculnya kasus-kasus penjualan pulau oleh perorangan, terakhir kasus penjualan Pulau Panjang dan Pulau Mariam di Kecamatan Plampang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), oleh individu yang termuat dalam iklan di jaringan internet beberapa waktu lalu. Kasus ini sebenarnya bukanlah yang pertama kali terjadi, karena sebelumnya pernah terjadi peristiwa penguasaan individu berkewarganegaraan asing, yaitu di Pulau Bidadari di Nusa Tenggara Timur. Juga

sejumlah pulau di kawasan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Penguasaan pulau-pulau kecil oleh perorangan juga terjadi di perairan sekitar Sumenep, Madura, Jawa Timur. Setidaknya tiga pulau sudah menjadi hak milik perorangan. Ketiga pulau itu adalah Pulau Piropok dan Pulau Kamarong di Desa Paleat serta Pulau Sitabok di Desa Sapeken. Ketiganya termasuk wilayah Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Menyadari telah terjadinya beberapa peristiwa di atas, maka sudah sepatutnya Pemerintah dan aparat negara harus memberikan perhatian serius dalam proses penanganan teritori dan batas-batasnya yang menjadi kedaulatan bangsa Indonesia.

Perhatian serius terhadap penanganan masalah tersebut, juga perlu diberikan dalam kerangka yang lebih luas, termasuk terhadap pulaupulau di posisi terluar. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2005, ada 92 pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Jaringan pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun pusat, dengan partisipasi aktif masyarakat, sangat dituntut peranan aktifnya dalam memperhatikan kondisi pulau-pulau yang ada. Perhatian dan dorongan juga harus terkait dengan kemajuan tingkat sosial ekonomi bagi masyarakat yang mendiami pulau-pulau terluar tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang pengawasan, pada Masa Persidangan III ini Dewan akan melakukan pemrosesan lebih lanjut interpelasi DPR RI terhadap penyelesaian kasus Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), dan bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hak interpelasi anggota Dewan telah disetujui menjadi interpelasi DPR secara aklamasi menjelang berakhirnya Masa Sidang II Desember yang lalu. Publik dan media massa meragukan kelanjutan interpelasi ini karena sebagaimana interpelasi-interpelasi sebelumnya kandas, atau tidak berlanjut sesuai makna yang terkandung di dalamnya. Untuk interpelasi KLBI dan BLBI, DPR perlu mendapat penjelasan Pemerintah apa saja langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam kasus ini, langkah untuk menyelamatkan uang negara sebesar Rp.600 triliun. Selain masalah hukum, bagi obligor yang nakal, masalah utama adalah penyelamatan uang negara.

Selanjutnya, melalui keputusan Bamus juga akan diagendakan pembahasan dan penanganan atas surat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 19 September 2007 tentang Penggantian Hakim Konstitusi periode 2003-2008, untuk memenuhi UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan penetapan Pimpinan KPK oleh DPR RI baru-baru ini, Dewan meminta masyarakat untuk memberi kesempatan kepada saudara Antasari Azhar dan kawan-kawan sebagai Pimpinan KPK yang baru. Bed mereka waktu untuk menyusun program dan selanjutnya menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Undang-Undang. DPR terutama Komisi III akan mengikuti secara seksama atas pelaksanaan tugas dan kinerjanya. Dewan memahami besarnya harapan masyarakat terhadap kinerja lembaga ini, tentu bukan tanpa alasan, karena begitu luasnya cakupan tugas yang dimiliki oleh KPK, maka tidak salah bila harapan

pemberantasan korupsi kita gantungkan di tangan Pimpinan KPK yang baru. Oleh karena itu, Dewan berharap agar keberadaan KPK semakin diakui sebagai lembaga pemberantas korupsi, maka komitmen dan kesungguhan Pimpinan KPK beserta anggotanya harus dibuktikan dengan aksi dan hasil yang nyata, terutama dalam menangani korupsi "kakap", khususnya berkaitan dengan kasus KLBI dan BLBI.

Problem lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) tidak hanya di bidang kesejahteraan, tetapi juga terhadap ancaman keamanan karena perbedaan keyakinan, pelanggaran HAM, serta pemberian kemudahan untuk memperoleh akses informasi publik yang sangat diperlukan. Ini semua berkaitan dengan *social security* dan *human security*.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam melaksanakan fungsi anggaran dalam Masa Persidangan III Tahun ini, Panitia Anggaran DPR RI akan menyelesaikan pembahasan atas RUU Pelaksanaan APBN Tahun 2006 yang sempat tertunda serta melaksanakan monitoring atas pelaksanaan APBN dan Perubahan APBN 2007. Baru pada Masa Sidang IV DPR akan mulai mengagendakan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2009.

Sidang Dewan yang terhormat,

Memasuki tahun 2008 ini, masih banyak tantangan ekonomi yang harus kita hadapi di antaranya adalah masih tingginya harga minyak mentah di pasar internasional yang sempat mencapai angka 100 Dolar AS per barel. Pemerintah harus lebih peka dan serius dalam menyikapi kenaikan harga minyak mentah tersebut dengan berbagai langkah antisipatif agar tidak terlalu membebani APBN. Sembilan langkah yang sudah direncanakan Pemerintah ke depan hendaknya dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Masalah rendahnya produksi minyak mentah Indonesia tahun 2007 lalu yang jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2007 sebesar 950.000 barel per hari harus dicarikan solusinya. *Lifting* produksi minyak mentah sepanjang tahun 2007 diperkirakan hanya 910.000 barel per hari. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan BBM di dalam negeri, DPR mendesak Pemerintah dan PT. Pertamina untuk menambah produksi minyak mentah. Dalam kaitan ini, Dewan mendukung rencana PT.Pertamina untuk meningkatkan produksi minyak mentah pada tahun 2008-2012 sejalan dengan diberikannya hak eksplorasi dan eksploitasi untuk beberapa sumur minyak di dalam negeri. Produksi minyak mentah PT. Pertamina tahun 2007 lalu diperkirakan mencapai 146.000 barel per hari atau naik dari 135.000 barel per hari pada tahun 2006. Tahun 2008 ini produksi minyak mentah PT. Pertamina diprediksi akan berjumlah 170.000 barel per hari dan akan diprediksi meningkat sampai tahun 2012.

Angka pengangguran hingga akhir tahun 2007 masih tinggi. Kondisi ini merupakan beban Pemerintah dalam satu tahun ke depan. Besarnya angka pengangguran tersebut juga disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja yang jumlahnya terus bertambah rata-rata 2,5 juta setiap tahun. Apabila target pertumbuhan ekonomi (PDB) tahun 2008 sebesar 6,8%

dapat dicapai, maka angka pengangguran paling tidak dapat ditekan di bawah 10 juta orang.

Dewan juga merasa prihatin atas masih tingginya kemiskinan di tanah air. Dewan menaruh perhatian serius dan senantiasa terus memonitor pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan pada tahun 2008 yang merupakan lanjutan dari program tahun 2007 lalu, seperti program bantuan beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Program pengembangan UMKM yang didukung oleh Bank Rakyat Indonesia melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan fasilitas kredit UMKM baru dari BRI. Kita semua harus menyadari, bahwa Pasal 33 UUD 1945 menjadikan Koperasi sebagai "sokoguru perekonomian". Oleh karena itu, program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus paralel dengan langkah Pemerintah di dalam mengembangkan koperasi, yang dapat menjangkau rakyat kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan. Ini yang harus dipacu, agar demokrasi ekonomi sebagaimana yang dicita-citakan oleh *founding fathers*, dapat diwujudkan secara nyata.

Sidang Dewan yang terhormat,

Tantangan pemerintah lainnya dalam memasuki tahun 2008 antara lain adalah menjaga stabilitas makro-ekonomi dan pencapaian target-target ekonomi-makro pada APBN 2008, termasuk upaya meningkatkan penyerapan anggaran belanja pemerintah dalam APBN 2008 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PDB). Berdasarkan data BPS sumbangan belanja Pemerintah dalam APBN 2007 terhadap PDB tahun 2007 pada Triwulan 111/2007 masih sangat rendah dibandingkan kontribusi konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor, yakni hanya 0,5%. Dewan dan Pemerintah telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi (PDB) tahun 2008 sebesar 6,8%. Untuk itu, Pemerintah perlu kerja keras agar target tersebut tercapai, salah satunya melalui kontribusi anggaran belanja pemerintah dalam APBN 2008.

Masalah lain yang menjadi fokus perhatian Dewan adalah kecenderungan menipisnya cadangan beras nasional memasuki tahun 2008 ini. Dewan berharap agar Pemerintah lebih memprioritaskan peningkatan produksi beras dalam negeri untuk menambah stok beras nasional. Alangkah bijaksananya apabila Perum Bulog menunda dahulu impor beras dari negara lain guna menutupi kekurangan stok beras, dan impor merupakan pilihan terakhir apabila produksi beras dalam negeri pada tahun 2008 ini tidak mencukupi. Untuk itu, perlu peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Perum Bulog, Departemen Pertanian, dan Departemen Perdagangan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Ajang olahraga SEA GAMES 2007 di Bangkok Thailand, baru saja usai. Di tengah kritik keras terhadap merosotnya prestasi olahraga di tanah air, kita sedikit lega dengan kenaikan peringkat dalam pesta olahraga se-Asia Tenggara tersebut. Kalau dua tahun lalu Indonesia menempati peringkat ke-5, sekarang naik menjadi ke-4.

namun, perolehan medali yang didapat kontingen Indonesia masih di bawah target, karena ada cabang-cabang olahraga yang gagal mempersembahkan medali emas. Meski demikian, kita memberikan apresiasi dan penghargaan kepada atlet-atlet kita yang telah berjuang dengan gagah berani, semangat tinggi dalam ikut mengumandangkan Indonesia Raya di arena SEA GAMES tersebut. Pemerintah harus memberikan penghargaan dan bonus sesuai dengan janji yang telah diberikan bagi atlet-atlet peraih medali emas.

Kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, juga kepada Pimpinan Komite Olahraga Indonesia, Dewan meminta untuk dapat membina dan mengembalikan prestasi para olahragawan kita dengan berbagai langkah strategis. Kita malu sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, tetapi kita jauh tertinggal dalam prestasi. Kita patut bertanya, pasti ada yang salah dalam pembinaan olahraga di tanah air kita.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dewan menyambut positif penyelenggaraan Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Bali, Desember 2007 yang lalu, yang telah menghasilkan *Bali Road Map* atau Peta Jalan Bali, yang akan menjadi jalan untuk mencapai konsensus baru pada tahun 2009 dalam hal penanganan perubahan iklim sebagai pengganti Protokol Kyoto fase pertama yang akan berakhir pada tahun 2012. Dalam hal ini Dewan perlu menegaskan bahwa upaya pencarian solusi atas dampak terburuk dari perubahan iklim harus menjadi prioritas utama bagi seluruh bangsa di dunia.

Masalah perubahan iklim dan pemanasan global menjadi perhatian dunia, mengingat dampaknya yang semakin terasa dewasa ini. Pemanasan global merupakan persoalan konkret saat ini, dimana kehidupan manusia menjadi semakin tidak nyaman. Pemanasan global membuat semakin banyak orang kehilangan tempat tinggal akibat serangan badai dan bencana ekologi lainnya. Cuaca yang tidak menentu juga menyebabkan banjir dan tanah longsor serta kekeringan yang memperburuk sektor pertanian, dan sebagainya. Menurut seorang peneliti *Centre for International Forestry Research (CIFOR)*, perubahan iklim akibat pemanasan global dalam satu dekade ini sudah memicu banyak bencana di Indonesia, mulai dari angin puting beliung, kemarau panjang, banjir, gempa bumi, gunung meletus, hingga air laut pasang (rob). Jika frekuensi bencana di era 1940-an hanya 100 per dekade, maka mulai era 1990-an bencana di Indonesia mencapai 2.800 per dekade, dan ini terkait dengan iklim dan cuaca ekstrem.

Terbongkarnya pencurian dan pemalsuan benda-benda purbakala beberapa waktu lalu, seperti pencurian dan pemalsuan terhadap lima arca batu serta 60 koleksi lainnya di Museum Radya Pustaka Surakarta serta pencurian terhadap ratusan megalit asal Kecamatan Lore Selatan dan Lore Utara, Poso, Sulawesi Tengah, sangat memprihatinkan. Benda-benda purbakala tersebut adalah jejak sejarah masa lalu bangsa Indonesia yang harus di jaga, dirawat, dikelola, dan diamankan sebaiknya. Terjadinya pencurian benda-benda bersejarah tersebut, merupakan

ironi bagi bangsa Indonesia, yang menunjukkan bukan saja adanya orang-orang jahat yang berniat menghilangkan jejak sejarah masa lalu bangsa, juga keinginan untuk mendapatkan uang oleh pejabat serta pegawai-pegawai yang diberi amanat untuk menjaga benda-benda sejarah tersebut. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, bangsa yang bisa mengambil pelajaran, baik sisi positif maupun negatif dari peristiwa di masa lalu. Oleh karena itu Dewan berharap, Pemerintah dapat segera mengatasi hal ini sebaik-baiknya. Pemerintah dan aparatnya harus mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelakunya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang luar negeri, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah berhasil dalam mengemban tugas berkaitan dengan diplomasi keparlemenan melalui aktifitas berbagai delegasi, baik delegasi teknis maupun delegasi muhibah ke berbagai negara dan konferensi di fora internasional, serta telah memberikah kontribusi yang cukup baik bagi kinerja politik luar negeri Indonesia. Pada tahun 2007 DPR kembali menjadi tuan rumah Sidang Majelis Umum *Inter-Parliamentary Union* (IPU) di Bali. Peran aktif DPR dalam sidang-sidang IPU yang dilaksanakan pada bulan Mei 2007 tersebut telah memberi arti yang signifikan bagi upaya mengurangi ketegangan dunia akibat masalah nuklir Iran dan konflik bersenjata di Irak yang ketika itu tengah mengalami eskalasi. Keterlibatan rutin Dewan juga telah memberikan kontribusi bagi peningkatan peran RI di PBB. Oleh karena itu, bukan hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa Dewan juga berperan penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan UNFCCC di Bali pada awal Desember ini. Begitu juga Sidang *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF), dan dua kali *ad hoc committee meeting* dalam rangka transformasi AIPO menjadi AIPA, organisasi parlemen yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, peran Dewan dalam melakukan ratifikasi terhadap konvensi atau perjanjian internasional seperti perjanjian internasional yang telah dilakukan dengan beberapa negara antara lain dengan Vietnam dan Australia menunjukkan peran Dewan dalam pembentukan perjanjian internasional yang memiliki arti penting bagi hubungan kedua negara dan bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan terkait dengan perjanjian ekstradisi dan perjanjian pertahanan yang dilakukan antara Indonesia dengan Singapura, juga menjadi perhatian Dewan, khususnya perjanjian tentang Pertahanan (DCA). Dewan meminta agar perjanjian pertahanan ini dapat ditinjau kembali bagi kepentingan Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Situasi politik dan keamanan yang terjadi di berbagai kawasan dunia juga perlu mendapat perhatian kita bersama. Dewan memperhatikan dan menyatakan prihatin, bahwa ternyata situasi politik dan keamanan di sejumlah kawasan dunia hingga saat ini masih belum sepenuhnya kondusif, bahkan masih saja diwarnai oleh aksi-aksi kekerasan yang selalu menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi

di beberapa negara Afrika, Irak, Afghanistan, Libanon, dan dalam konflik Palestina-Israel di Timur Tengah. Dewan juga menyatakan prihatin dan mengutuk keras atas peristiwa serangan bom yang terjadi di Aljazair bulan Desember 2007 lalu yang telah menewaskan sejumlah warga sipil dan staf Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dewan juga mengutuk keras tindakan pembunuhan politik yang mengakibatkan terbunuhnya mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto dan sejumlah pengikutnya pada kampanye politik di Rawalpindi 27 Desember 2007 yang lalu. Dewan menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga almarhumah dan bangsa Pakistan. Dewan prihatin atas kekerasan politik yang terus berlangsung di Pakistan dan berharap pemerintah Pakistan dapat memulihkan situasi dan stabilitas politik melalui cara-cara yang adil dan demokratis.

Memasuki tahun 2008, Dewan berharap berbagai konflik dan aksi- aksi kekerasan yang masih saja terjadi di beberapa kawasan dunia dapat segera diakhiri dan diupayakan penyelesaiannya melalui cara-cara damai. Khusus terhadap proses perdamaian Palestina-Israel, Dewan berharap seluruh elemen bangsa Palestina dilibatkan dan Dewan berharap proses perdamaian tersebut mengalami kemajuan berarti dalam tahun 2008 ini. Dewan juga berharap Indonesia, yang hingga akhir tahun 2008 ini menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, dapat lebih proaktif lagi dalam proses perdamaian di Timur Tengah tersebut dan lebih berperan dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia.

Dewan juga berharap stabilitas politik dan keamanan terwujud di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara. ASEAN diharapkan dapat lebih berperan dalam menghadapi tantangan global dan menjadi pemain efektif di tataran regional dan internasional. Penguatan institusi demokrasi, pemajuan hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu terus didorong di kawasan ini. Khusus terhadap situasi di Myanmar, Dewan berharap dalam tahun 2008 ini terjadi kemajuan berarti dalam kehidupan demokrasi dan kemajuan hak asasi manusia di Myanmar. Demikian pula dengan negara tetangga kita Thailand, yang baru saja selesai menyelenggarakan Pemilu Parlemen.

Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan negara-negara sahabat juga perlu terus dilakukan oleh Indonesia, khususnya dengan negara-negara tetangga di kawasan. Oleh karenanya, Dewan menyambut baik pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PM Australia yang baru, Kevin Rudd, di Bali saat penyelenggaraan Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim Desember 2007 yang lalu. Kebijakan pemerintahan baru Australia yang menempatkan hubungan bilateralnya dengan Indonesia sebagai prioritas tertinggi, patut disambut positif untuk dapat lebih meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia-Australia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum kami menutup Pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2007-2008 ini, izinkanlah kami atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan mengucapkan "Selamat" atas pengangkatan Saudara Jenderal Djoko Santoso sebagai Panglima TNI, Saudara Letnan Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo

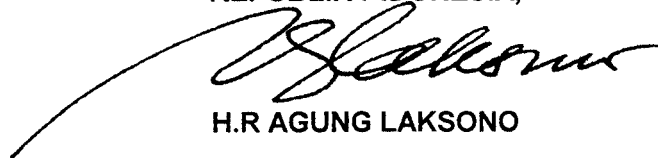
sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan Saudara Marsekal Madya Subandrio sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Dengan adanya regenerasi di tubuh TNI ini, Dewan berharap agar profesionalitas TNI dapat terus ditingkatkan dan komitmen netralitas TNI dapat terus terjaga. Peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi perhatian utama bagi Pimpinan TNI yang baru.

Demikianlah hal-hal yang perlu kami sampaikan dan menjadi pokok-pokok kegiatan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2007-2008 yang menjadi perhatian Dewan dalam rangka pelaksanaan tiga fungsi Dewan. Selanjutnya, dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah Robil'Alamin*, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan ditutup. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat bertugas. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa memberikan Taufiq dan HidayahNya kepada kita semua. *Amin ya Robal'Alamin*.

Atas segala perhatian saudara-saudara, kami mengucapkan terima kasih. Sekian.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,



H.R AGUNG LAKSONO